PELAKSANAAN EVALUASI PEMBELAJARAN IPS BERBASIS KTSP KELAS V

Hanung Wicaksono, Arini Estiastuti, Kurniana Bektiningsih

Department of Primary School Teacher Education Faculty of Education, Semarang State University Gedung A4, Ngaliyan, Semarang, Indonesia 50186 085729148028

email: hnunk18@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to describe the evaluation of learning social studies contained in the class V SD Negeri Semarang District of Gunungpati at KD 2.4 ie appreciate the struggles of the characters in maintaining independence. This research was conducted in six primary schools Gunungpati District of Semarang. This study used qualitative research methods. Data collection techniques used were observation, interviews, documentation, field notes, as well as triangulation. The results showed that 1) Overall was a teacher in the fifth grade elementary school as research areas have been carrying out evaluation of learning according to the mandate set out in Permenfiknas No. 16, 2007.. (2) Master Class V in primary schools where research was conducted to evaluate the results of social studies students through the activities of daily tests, homework, and administration tasks. Based on the results of research and discussion, the researchers advise sevagai the following (1) The evaluation study conducted by the Social Science teacher Class V is expected to be as objective as possible by making the assessment format in accordance with the basic competencies evaluated .. (2) The evaluation of learning IPS done by teachers Class V is not expected to stop at the stage of entering values only, but will also use the results of the evaluation as a means to improve the quality of learning.

Keywords: *learning evaluation of social studies; KTSP; elementary school*

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang karena didukung oleh sejumlah fakta positif yaitu letak geopolitik yang sangat strategis, kekayaan alam keanekaragaman dan hayati, kemajemukan sosial budaya dan jumlah populasi penduduk yang besar. Oleh karena itu bangsa Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk menjadi bangsa yang maju, adil dan makmur. Namun fakta positif ini belum cukup untuk mewujudkan kemajuan bangsa, masih ada faktor mendasar lain yang harus diperhatikan secara sungguhsungguh yaitu mengenai sumber daya manusia. Betapa banyaknya fakta positif tadi diyakini belum mampu membawa bangsa Indonesia sejajar dengan bangsabangsa lain yang sudah terlebih dahulu

memiliki nama besar. Apalah arti modal yang melimpah jika kita tidak memiliki pengetahuan untuk memanfaatkannya, Guna memperbaiki dan meningkatakan kualitas sumber daya manusia Indonesia diperlukan keseriusan pembangunan segala bidang dalam kehidupan masyarakat khususnya bidang pendidikan.

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional Tentang pasal 1 ayat 1 pendidikan diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya memiliki untuk kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan mempunyai peranan penting dalam mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berkompeten. Sehingga kondisi sumber daya manusia suatu bangsa dapat dilihat dari kondisi dunia pendidikan bangsa tersebut. Dalam upaya pembangunan pendidikan Indonesia Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menetapkan visi pendidikan Indonesia yaitu "Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan Kebudayaan dan untuk

Membentuk Insan Indonesia yang Cerdas dan Beradab". Pernyataan ini menggambarkan kondisi masa depan bangsa Indonesia yang ingin dicapai dan diarahkan secara konsisten, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi Kementerian Pendidikan dan kebudayaan tersebut sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam UU no. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 yang menyebutkan bahwa: Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa bermartabat dalam rangka yang kehidupan mencerdaskan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Selaras dengan visi dan tujuan pendidikan nasional tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam hal ini pemerintah mempunyai kewajiban konstitusional untuk memberi pelayanan pendidilan yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, upaya peningkatan akses masyarakat terhadap

pendidikan lebih berkualitas yang merupakan mandat yang harus dilaksanakan pemerintah karena juga telah tertuang dalam teks Pembukaan 1945 yaitu untuk melindungi UUD segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteran umum, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, yang perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Upaya- upaya dalam meningkatkan akses pendidikan berkualitas bagi seluruh warga negara telah dilaksanakan pemerintah antara lain fasilitas pendidikan dasar gratis dan juga program wajib belajar 9 tahun yang kemudian mulai ditingkatkan menjadi wajib belajar 12 tahun, serta peningkatan fasilitas sarana prasarana pembelajaran.

Selain itu Pemerintah juga gencar melakukan inovasi dan perbaikan di sektor proses pembelajaran antara lain pengembangan kurikulum,pengembangan model pembelajaran, pemanfaatan media pembelajaran dan pengubahan sistem penilaian. Sejak tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami beberapa kali perubahan yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004 (KBK), 2006 (KTSP), dan kurikulum 2013.

Perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan iptek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab, kurikulum sebagai seperangkat rencana pendidikan perlu dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Semua kurikulum dirancang berdasarkan landasan yang sama yaitu Pancasila dan UUD 1945. perbedaannya pada penekanan pokok dan tujuan pendidikan serta pendekatan dalam merealisasikannya.

Dalam Permendibud No. 160 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013 pasal 1, satuan pendidikan dasar dan menengah yang baru melaksanakan kurikulum 2013 pada tahun ajaran 2014/2015 kembali melaksanakan kurikulum 2006 pada semester 2 tahun ajaran 2014/2015 sampai ada ketetapan dari Kementerian untuk melaksanakan kurikulum 2013. Dengan dikeluarkannya Permendikbud ini maka sebagian besar satuan pendidikan menengah dasar dan kembali melaksanakan kurikulum 2006 (KTSP) sebagai panduan dalam melaksanakan proses pembelajaran.

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun oleh dan dilaksanakan di masingmasing satuan pendidikan di Indonesia. KTSP secara yuridis diamanatkan oleh UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Peraturan Menteri Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Penyusunan **KTSP** oleh sekolah dimulai pada tahun ajaran 2007/2008 dengan mengacu pada Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) untuk pendidikan dasar dan menengah sebagaimana yang diterbitkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional masing-masing No. 22 Tahun 2006, dan No. 23 Tahun 2006, serta panduan pengembangan KTSP dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Kurikulum **Tingkat** Satuan Pendidikan (KTSP) merupakan upaya untuk menyempurnakan kurikulum agar lebih familiar dengan guru, karena mereka banyak dilibatkan dan diharapkan memiliki tanggung jawab yang memadai. Penyempurnaan kurikulum yang berkelanjutan merupakan keharusan agar sistem pendidikan nasional selalu relevan dan kompetitif. Hal tersebut juga sejalan dengan UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 35 dan 36 yang menekankan perlunya peningkatan standar nasional pendidikan sebagai acuan kurikulum secara berencana dan berkala dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Pembelajaran berbasis KTSP dapat sebagai didefinisikan suatu proses penerapan ide, konsep, dan kebijakan KTSP dalam suatu aktivitas pembelajaran sehingga peserta didik menguasai seperangkat kompetensi tertentu, sebagai interaksi dengan lingkungan. Implementasi KTSP juga dapat diartikan sebagai aktualisasi kurikulum operasional dalam bentuk pembelajaran. Implementasi KTSP juga dapat diartikan sebagai aktualisasi kurikulum operasional dalam bentuk pembelajaran (Mulyasa 2011: 246), Proses pembelajaran ini bertujuan untuk membantu peserta didik melakukan kegiatan belajar, sesuai dengan tujuan pembelajaran agar terwujudnya efisiensi dan efektivitas kegiatan belajar yang dilakukan peserta didik.

Sementara itu, untuk menyediakan informasi mengenai baik atau buruknya suatu proses pembelajaran, maka perlu dilaksanakan proses evaluasi. Proses evaluasi tersebut diharapkan dapat memberikan sebuah informasi yang

dijadikan dasar untuk mengetahui taraf kemajuan perkembangan dan pencapaian belajar peserta didik, serta keefektifan pengajaran guru sehingga bermanfaat bagi kemajuan pendidikan di Indonesia. Hal ini selaras dengan pendapat Zainal Arifin (2012: 6) yang menyatakan bahwa evaluasi pembelajaran merupakan komponen penting dan tahap yang harus ditempuh oleh guru untuk mengetahui keefektifan pembelajaran, dan hasil yang diperoleh dapat dijadikan guru sebagai umpan balik dalam menyempurnakan program dan kegiatan pembelajaran. Sementara itu Anas Sudijono (2013: 30) bahwa berpandangan evaluasi pembelajaran terhadap hasil belajar peserta didik mencakup dua hal yaitu mengenai tingkat penguasaan peserta didik terhadap tujuan-tujuan khusus yang ingin dicapai dalam unit-unit program pengajaran yang bersifat terbatas serta mengenai tingkat pencapaian peserta didik terhadap tujuan-tujuan umum pengajaran.

Pada umumnya evaluasi pembelajaran dilakukan pada setiap akhir dan selalu dikaitkan dengan prestasi peserta didik yang dinyatakan dalam bentuk angka. Hasil belajar peserta didik dalam bentuk nilai angka merupakan indikator utama yang digunakan untuk

menilai kualitas pembelajaran dan kelulusan peserta didik dari suatu lembaga pendidikan. Dampak dari pandangan tersebut mendorong guru untuk berlomba-lomba mentransfer materi pelajaran sebanyak-banyaknya mempersiapkan anak didiknya dalam menghadapi evaluasi proses pembelajaran. Akibatnya banyak guru mengesampingkan aspek-aspek lain dalam proses pembelajaran yang sebenarnya juga sangat penting. Karena menurut Purwanto (2013: 48) dalam proses pembelajaran terdapat tiga domain atau aspek dalam hasil belajar yang akan yaitu kognitif, diubah afektif psikomotorik.

dari Dalam jurnal penelitian Thomas Wibowo No. 13 Tahun Ke-8 semakin dijelaskan bahwa sekolah menekankan prestasi belajar pada nilai dalam bentuk angka, maka semakin besar kemungkinan peserta didik untuk berbuat curang dalam mengikuti proses pembelajaran. Peserta didik yang diarahkan untuk berorientasi pada hasil/nilai dalam melakukan sesuatu hal, maka peserta didik tidak akan melakukan hal tersebut dengan baik. Sehingga akan terjadi persaingan yang tidak sehat di dalam kelas, dan peserta didik kurang dapat saling berkomunikasi positif yang

berujung pada terhambatnya perkembangan kecerdasan sosial peserta didik. Maka di sinilah dibutuhkan peran guru untuk menanamkan konsep pada diri peserta didik tentang keseimbangan antara tiga domain hasil belajar yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Karena menurut I Nengah Sudja dalam jurnal penelitian Vol. 3 No. 2 dijelaskan bahwa salah satu dari sekian banyak faktor yang berpengaruh terhadap proses pembelajaran dan berimbas pada kualitas pendidikan adalah faktor guru.

Studi pendahuluan yang dilaksanakan oleh peneliti di lokasi penelitian yaitu di enam Sekolah Dasar Negeri di wilayah Kecamatan Gunungpati Kota Semarang berdasarkan rekomendasi dari UPTD setempat menunjukkan bahwa beberapa guru masih belum menggunakan kriteria penilaian yang jelas dalam kegiatan evaluasi pembelajaran sehingga penilaian yang dilaksanakan tidak dapat dilaksanakan seobyektif mungkin. Minimnya alokasi waktu pembelajaran juga dikeluhkan oleh guru sehingga tidak dapat melaksanakan proses ealuasi secara maksimal, sementara materi yang harus disampaikan cukup banyak terutama pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial.

Melihat fakta yuridis, teoritis, dan empiris yang menyatakan bahwa

pentingnya kegiatan evaluasi dalam pelaksanaan pembelajaran, di mana hasil evaluasi pembelajaran akan digunakan untuk menilai keefektifan proses pembelajaran dan digunakan sebagai batu pijakan untuk kebijakan proses pembelajaran selanjutnya, serta peran guru yang yang sangat berpengaruh keberhasilan terhadap proses pembelajaran, maka peneliti melakukan penelitian terkait pelaksanaan evaluasi pembelajaran berbasis KTSP yang dilaksanakan oleh guru beserta teknik dan alat yang digunakan oleh guru dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran berbasis KTSP..

Peneliti fokus menetapkan hanya penelitian mengenai evaluasi pembelajaran pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Hal ini sejalan dengan jurnal penelitian dari Enok Muryani dan Helius Syamsudin Vol. 9 No. 1 yang menyatakan bahwa Ilmu Pengetahuan Sosial yang menjadi fondasi penting dalam pengembangan intelektual, emosional, kultural, dan sosial peserta didik, yaitu mampu menumbuhkembangkan cara berpikir, dan berperilaku bersikap, yang bertanggungjawab selaku individu, warga masyarakat, dan warga dunia. Selain itu mata pelajaran IPS dirancang untuk

mengembangkan pemahaman dan kemampuan analisis, terhadap kondisi masyarakat dalam memasuki kehidupan bermasyarakat yang dinamis, disusun serta secara sistematis komprehensif, dan terpadu dalam proses pembelajaran menuju kedewasaan dan keberhasilan dalam kehidupan di masyarakat karena dengan pendekatan tersebutdiharapkan peserta didikakan memperoleh pemahaman yang lebih luas dan mendalam pada bidang ilmu yang berkaitan. Serta fakta empiris di lapangan terkait masih minimnya penggunaan kriteria penilaian yang jelas pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial dan minimnya alokasi waktu sementara materi yang harus disampaikan pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial cukup banyak.

Kecamatan Gunungpati merupakan tempat yang peneliti gunakan untuk penelitian yang terletak di Kota Semarang. Di Kecamatan Gunungpati tetdapat 33 SD Negeri dan 5 SD Swasta yang terbagi menjadi 4 gugus. Peneliti mengambil 6 SD Negeri dengan enam orang guru kelas V sebagai subyek penelitian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif dengan

menggunakan pendekatan kualitatif. Sukmadinata (2013: 54) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yamg berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau serta tidak mengadakan manipulasi atau pengubahan variabel-variabel pada bebas, tetapi menggambarkan suatu kondisi apa adanya. Sementara itu Bogdan Taylor (dalam Moleong, 2013: 4) menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari individu-individu atau perilaku yang diamatinya.

Penelitian ini dilaksanakan di enam Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, yaitu SD Negeri Plalangan 01, SD Negeri Plalangan 02, SD Negeri Gunungpati 02, SD Negeri Gunungpati 03, SD Negeri Jatirejo, dan SD Negeri Pongangan, pada tanggal 12 Februari sampai 3 Mei 2016 dengan mengambil subyek penelitian yaitu guru kelas V. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu

observasi, wawancara terhadap guru, wawancara terhadap kepala sekolah, dokumentasi, catatan lapangan, serta triangulasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis sebelum lapangan, analisis selama di lapangan (reduksi data, penyajian data, verifikasi), dan analisis setelah selesai di lapangan. Uji validitas dan reliabilitas dalam penelitian kualitatif ini dapat dinyatakan dengan menggunakan derajat keterpercayaan (credibility), keteralihan (transferability), kebergantungan (dependability), dan kepastian (confirmability).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permendiknas RI No. 16 Tahun 2007 mengamantkan kompetensi yang harus dimiliki oleh guru, salah satunya adalah kompetensi pedagogik dengan salah satu subkompetensi menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.

Guru kelas V di SD Negeri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang telah melaksanakan evaluasi pembelajaran IPS berbasis KTSP sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Permendiknas RI No. 16 Tahun 2007. Hasil observasi tentang pelaksanaan evaluasi pembelajaran IPS berbasis KTSP menunjukkan bahwa guru kelas V di SD Negeri yang menjadi lokasi penelitian telah melaksanakan evaluasisesuai dengan mekanisme pelaksanaan evaluasi menurut Depdiknas (2008: 19).

Tabel 1 Hasil Observasi Mekanisme Pelaksanaan Evaluasi Pembelajaran IPS Kelas V

No	Nama SD		I	II	III	ΙV
1		Negeri angan	1	V	V	V
2		Negeri angan	V	$\sqrt{}$	\checkmark	$\sqrt{}$
3		Negeri ungpati	\checkmark	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$
4		Negeri ungpati	\checkmark	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$
5	SD Jatir	Negeri ejo	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$
6	SD Pons	Negeri gangan	V	√	V	V

Indikator pertama adalah perencanaan evaluasi, indikator kedua pelaksanaan evaluasi , indikator ketiga

adalah analisi dan tindak lanjut evaluasi, serta indikator keempet adalah pelaporan hasil evaluasi. Guru Kelas V di SD Negeri yang menjadi lokasi penelitian menggunakan teknik tes dan nontes dalam melaksabakan evaluasi pembelajaran IPS. Teknik tes meliputi ulangan harian, pemberian tugas, dan pekerjaan rumah. Sedangkan teknik nontes dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap aktivitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Teknis tes digunakan untuk mengevaluasi hasil belajar peserta didik pada aspek kognitif, sementara teknik nontes digunakan untuk mengevaluasi hasil belajar peserta didik pada aspek afektif dan psikomotorik.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Guru Kelas V di SD Negeri Plalangan 01, SD Negeri Plalangan 02, SD Negeri Gunungpati 02, SD Negeri Gunungpati 03, SD negeri Jatirejo, dan SD Negeri Pongangan telah melaksanakan evaluasi pembelajaran pada mata pelajaran IPS sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Permendiknas RI No. 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru dan melaksanakannya sesuai dengan mekanisme pelaksanaan evaluasi yang tertuang dalam Depdiknas (2008:19).

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zainal. 2012. *Evaluasi Pembelajaran*. Jakarta: Dirjen
 Pendidikan Islam Kementerian
 Agama.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008.

 Panduan Penyelenggaraan

 Pembelajaran Tuntas (Mastery

 Learning). Jakarta: Depdiknas.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT

 Remaja Rosdakarya Offset.
- Mulyasa, E. 2011. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Bandung: PT
 Remaja Rosdakarya
- Permendiknas RI No. 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
- Permendibud No. 160 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013 pasal 1
- Purwanto. 2013. *Evaluasi Hasil Belajar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudijono, Annas. 2013. *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Per
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan*.

 Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2005 Tentang Sistem Pendidikan Nas